



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, Bupati dalam memberikan izin dapat melimpahkan kepada Kepala BPM-P2TSP;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/1342/418.71/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1422/418.71/2016 tanggal 23 Mei 2016, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/1342/418.71/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1422/418.71/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan merubah Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 5 - 2016



Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 5 - 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 25-5-2016

**DAFTAR PERIZINAN
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA BPM-P2TSP**

| NO | NAMA PERIZINAN |
|-----|--|
| 1. | Izin Prinsip Penanaman Modal |
| 2. | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal |
| 3. | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal |
| 4. | Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal |
| 5. | Izin Lokasi |
| 6. | Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) |
| 7. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 8. | Izin Gangguan |
| 9. | Izin Usaha Penanaman Modal |
| 10. | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal |
| 11. | Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal |
| 12. | Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal |
| 13. | Izin Reklame |
| 14. | Izin Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 15. | Izin Penggilingan Padi/ Huller |
| 16. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) |
| 17. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) |
| | BIDANG KESEHATAN |
| 18. | Izin Apotik |
| 19. | Izin Toko Obat |
| 20. | Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama |
| 21. | Izin Penyelenggaraan Optik |
| 22. | Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik |
| 23. | Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D |
| 24. | Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik |
| | BIDANG KETENAGAKERJAAN |
| 25. | Izin Operasional Bursa Kerja Khusus |
| 26. | Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI) |
| 27. | Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI |
| 28. | Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta |
| 29. | Izin Pesawat Uap |
| | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| 30. | Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 31. | Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| 32. | Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air |

| | |
|-----|--|
| 33. | Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah |
| 34. | Izin Lingkungan |
| | BIDANG PEMBANGUNAN |
| 35. | Izin Usaha Jasa Konstruksi |
| | BIDANG KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN |
| 36. | Izin Usaha Industri (IUI) |
| 37. | Tanda Daftar Industri (TDI) |
| 38. | Tanda Daftar Gudang (TDG) |
| 39. | Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) |
| 40. | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) |
| 41. | Izin Usaha Toko Modern (IUTM) |
| | BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
| 42. | Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) |
| 43. | Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) |
| | BIDANG PARIWISATA |
| 44. | Tanda Daftar Usaha Pariwisata |
| | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
| 45. | Izin Jasa Titipan |
| 46. | Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi |
| 47. | Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) |
| 48. | Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi |
| 49. | Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing |
| 50. | Izin Usaha Perfilman di bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan. |
| 51. | Izin Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Festival Film dan Pekan Film di Kabupaten/ Kota |
| | BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
| 52. | Izin Pengolahan Persampahan |
| | BIDANG PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI |
| 53. | Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/ atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder |
| 54. | Izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM |
| 55. | Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum |
| 56. | Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) |
| 57. | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik |
| 58. | Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas |
| | BIDANG PERHUBUNGAN |
| 59. | Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir untuk Umum |
| 60. | Izin Trayek Angkutan Pedesaan/ Angkutan Kota |
| 61. | Izin Operasi Angkutan Taksi |
| 62. | Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang |

| | |
|---------------------------------|--|
| 63. | Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor |
| 64. | Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi |
| BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN | |
| 65. | Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat |
| 66. | Izin Jagal |
| 67. | Izin Depo atau Pet Shop Obat Hewan |
| BIDANG SOSIAL | |
| 68. | Izin Pengumpulan Uang atau Barang |

